

ABSTRAK

HIV-AIDS termasuk di dalam 10 penyakit yang sangat berbahaya dan berada pada urutan ke-6 sebagai penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia. Perkembangan penyakit HIV-AIDS di dunia diperparah dengan terdapat peningkatan secara konsisten penduduk penderita HIV-AIDS di dunia dari tahun 2010 hingga 2015 serta negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 sebagai negara dengan penderita HIV-AIDS tertinggi di Dunia. Di Indonesia, penyakit tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan Jawa Timur adalah provinsi urutan kedua dengan penderita HIV-AIDS terbanyak di Indonesia, dan Surabaya menjadi Kota dengan peringkat pertama penderita HIV-AIDS tertinggi di Jawa Timur. Sehingga, pemerintah Kota Surabaya memiliki komitmen melakukan kolaborasi antar SKPD dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan membagi tugas dan peran masing-masing dalam menanggulangi HIV-AIDS dengan menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/44/436.1.2/2013 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Kota Surabaya, serta Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya 094/1082/436.6.3/2016. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tentang proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan LSM dalam upaya Pencegahan Penyakit HIV-AIDS di Kota Surabaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan secara rinci mengenai proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah Penyakit HIV-AIDS di Kota Surabaya. Sehingga penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dengan memfokuskan kajian pada model proses kolaborasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana peneliti akan melakukan penelitian kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui lebih dalam mengenai aktifitas kolaborasi yang terjalin antar instansi. Kemudian, untuk menguji keabsahan data penelitian digunakan teknik triangulasi. Sedangkan, teknik analisis data dimulai dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya Dinas Kesehatan dan RSUD dr M. Soewandhi yang melaksanakan 3 level pencegahan penyakit HIV-AIDS di Kota Surabaya dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kajian teori. Serta proses kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah Daerah melalui SKPD yang terlibat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit HIV-AIDS masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan terdapat hasil diskusi langsung yang belum berjalan dengan baik, dimensi membangun kepercayaan yang belum terbentuk dengan baik, dimensi komitmen pada proses kolaborasi yang telah terbentuk dengan baik, dimensi pemahaman bersama yang tidak terbentuk dengan baik, dan dimensi hasil sementara kolaborasi yang belum terbentuk dengan baik.

Kata Kunci : Proses Kolaborasi, *Collaborative Governance*, Pencegahan Penyakit HIV-AIDS, Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat.